

DAFTAR BACAAN

Buku dan Literatur

- Anggriani, Jum, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
- Baswir, Revrison, *Tiada Ekonomi Kerakyatan Tanpa Kedaulatan Rakyat*, dalam Baswir, *Agenda Ekonomi Kerakyatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000.
- Burton Simatupang, Richard, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Broomlay, Ray, *The Urban Informalsector: Critical Prespective on Employmen-Housing Police*, Pargamon Press, Oxford, 1979.
- HD, Evers dan Rudiger Korff, *Urbanisasi di Asia Tenggara: Makna dan Kekuasaan di Ruang-Ruang Sosial*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2002.
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Hadjon, Philipus M., *Tentang Wewenang*, Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1990.
- Hadjon, Philipus M., et.all., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- M.D., Mahfud, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999.
- Manning, Chris dan Tadjuddin Noer Effendi, *Urbanisasi, Pengangguran dan Sektor Informal Kota*, Yayasan Obor Indonesia, Gramedia, Jakarta, 1985.
- Minarno, Nur Basuki, *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Laksbang Mediatama, Palangkaraya, 2009.
- McGee, T.G and Y.M Yeung, *Hawkers in Southeast Asian Cities: Planning for Bazaar Economy*, IDRC Ottawa, Canada, 1977.
- Permadi, Gilang, *Pedagang Kaki Lima Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini!*, Yudhistira, Bogor, 2007.
- Sri Djatmiati, Tatiek, *Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Fakultas Hukum Unoiversitas Airlangga, Surabaya, 2014.

Sri Djatimati, Tatiek, dkk., Buku Ajar Hukum Perizinan, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, 2005.

Stroink, F.A.M., *Inleiding in Het Staats-en Administratief Recht*, Samson H.D. Tjeenk Willink, Netherland, 1985.

Tambunan, Tulus, *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Di Indoensia : Isu-Isu Penting*, LP3ES, Jakarta, 2012.

Internet :

Arti Asas Contrarius Actus

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5a4091a9d6c08/arti-asas-contrarius-actus-i/>, diakses pada 15 Juli 2020

Cut Husnul, *Pedagang Kaki Lima*,

https://www.academia.edu/29520984/PEDAGANG_KAKI_LIMA,

dikunjungi pada tanggal 15 Mei 2019

Mekanisme Penerbitan Surat Izin Usaha Mikro Kecil

<https://www.finansialku.com/surat-izin-usaha-mikro-kecil/>, diakses pada 3 April 2020

Pengertian Preventif dan Represif, Contoh tujuan tindakan preventif dan represif,

<https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-preventif.html>

dikunjungi pada tanggal 1 Juni 2019

Penggunaan Wewenang Menurut Hukum,

<https://hehim29.blogspot.com/2011/04/penggunaan-wewenang-menurut-hukum-dan.html?m=1>

dikunjungi pada 1 Juni 2019

Pengertian Pengendalian (Controlling) dan Empat Langkah Pengendalian

<https://ilmumanajemenindustri.com/pengertian-pengendalian-controlling-empat-langkah-pengendalian/>, diakses pada 13 Juli 2020 pukul 11.22

PREVENTIF DAN REPRESIF : Pengertian Preventif dan Represif, Contoh,

Beserta Tujuannya, <https://pendidikan.co.id/preventif-dan-represif/>,

diakses pada 12 Maret 2020

Usaha Mikro: Klasifikasi, Dasar Hukum dan Kewajiban Perpajakan,

<https://www.online-pajak.com/usaha-mikro>, diakses pada 12 Februari 2020.

Wawancara Ibu Cucuk S.

<http://digilib.uinsby.ac.id/15826/49/Bab%204.pdf>, diakses pada Senin 4 Mei 2020. 23:41 WIB

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.(Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 68)